

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR OLEH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

Analysis of the Implementation of the Policy for Handling Disordered People by the Social Rehabilitation Division of the Tanjungpinang City Social Services in 2025

Wiber Oktavianis Lase^{1*}

Kustiawan²

Mukhlis³

*1-3 Prodi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Maritim Raja Ali
Haji, Tanjungpinang

*email:

wiberoktavianis@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan orang terlantar telah berjalan cukup baik. Faktor komunikasi berjalan efektif melalui koordinasi internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan program. Faktor disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi struktur birokrasi, pembagian tugas telah jelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, faktor sumber daya masih menjadi kendala utama, seperti keterbatasan anggaran, jumlah pegawai, fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan kepada petugas. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi kebijakan penanganan orang terlantar dengan mempertimbangkan keberadaan Tim Reaksi Cepat sebagai inovasi dalam percepatan penanganan masalah sosial. Oleh karena itu, di perlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, pelatihan kepada petugas, serta pengembangan program pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Orang
Terlantar, Rehabilitasi Sosial,
Dinas Sosial, Edwards III

Keywords:

Policy Implementation, Displaced
Persons, Social Rehabilitation,
Social Services, Edward III

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy for handling destitute persons by the Social Rehabilitation Division of the Tanjungpinang City Social Agency in 2025, utilizing George C. Edwards III's policy implementation model, which encompasses the indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and document analysis, with data analysis conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model. The results indicate that the implementation of the policy for handling destitute persons has proceeded quite well. The communication factor functioned effectively through internal and external coordination that supported program execution. The disposition factor demonstrated a strong commitment among implementers to providing services to the community. Regarding bureaucratic structure, the division of tasks was clearly defined through the existence of Standard Operating Procedures (SOPs). However, resource-related factors—such as budget limitations, staffing levels, supporting facilities, and a lack of staff training—remained primary obstacles. The novelty of this study lies in its focus on the implementation of the policy for destitute persons while considering the role of the Rapid Response Team as an innovation for accelerating the handling of social issues. Therefore, there is a need to strengthen resources, enhance cross-sectoral coordination, provide staff training, and develop sustainable socio-economic empowerment programs.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penmenuhan dasar, perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan. Negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan sosial seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara (Indonesia et al., 1945).

Sebagai respon dari amanat konstitusi pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan bagi yang mengalami masalah sosial Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Orang terlantar merupakan salah satu kelompok penerima pelayanan kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kondisi keterlantaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan, hingga mobilitas penduduk yang tinggi. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada individu maupun lingkungan sekitarnya. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan perdagangan, dan transportasi antar pulau. Posisi strategis ini mengakibatkan tingginya mobilitas penduduk yang berasal dari berbagai daerah ke Tanjungpinang. Adanya mobilitas ini mengakibatkan semakin banyaknya penduduk di Tanjungpinang serta menambah resiko keterlantaran akibat tidak mendapat pekerjaan di Tanjungpinang. Berdasarkan data bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2025 terdapat 55 orang terlantar yang di tangani dari jumlah tersebut, 38 klien dengan jenis kelamin Laki-laki serta 17 klien yang memiliki jenis kelamin Perempuan. Dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas penanganan yang diajukan klien seperti pembuatan jamkesda, dan pemulangan ke daerah asal.

Pemerintah kota Tanjungpinang melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) telah menetapkan tentang kualitas pelayanan dengan Dinas Sosial sebagai salah satu penggerak utama dalam menjalankan di lapangan (*Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang*, 2025). Di Kota Tanjungpinang penanganan orang terlantar juga diatur dalam peraturan wali kota nomor 34 tahun 2023 mengatur tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi Dinas Sosial.

Pelaksanaan penanganan orang terlantar di Kota Tanjungpinang di jalankan oleh bidang Rehabilitasi Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial. Dalam program rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara tetapi juga berperan dalam mengupayakan memulihkan fungsi sosial klien agar dapat melaksanakan aktivitas seperti sediakala di lingkungan bermasyarakat dengan mencakup proses penjangkauan, asesmen, bimbingan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial ke masyarakat.

Akan tetapi, dalam implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, kurangnya pelatihan kepada petugas, serta koordinasi antar lintas sektor. Maka Dalam hal ini melalui keputusan wali kota nomor 107 tahun 2025 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi disabilitas, orang terlantar, lansia, serta pengemis untuk membantu percepatan penanganan masalah sosial. (SK

TRC 2025.Pdf, n.d.). Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai fungsinya. George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dapat diukur berdasarkan 4 indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, sumber daya dan struktur birokrasi. Empat faktor ini menjadi landasan dalam menganalisis proses penanganan orang terlantar di Kota Tanjungpinang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi rehabilitasi sosial pada kelompok masyarakat rentan. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi, Suciarti, dan Kristian (2024) menitikberatkan pada implementasi rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di kota Bandung. Sementara Siswanto, Yuliani, Meilani (2024) mengkaji pelaksanaan asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar. Penelitian lain oleh Wiryawan (2024) menganalisis efektivitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial anak terlantar. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sumber daya serta kapasitas pelaksana.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap kelompok tertentu sementara kajian yang secara khusus membahas implementasi kebijakan penanganan orang terlantar masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan orang terlantar di daerah yang memiliki tingkat mobilitas tinggi juga masih jarang ditemukan. Penelitian ini menjadi penting mengingat Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan transportasi antar pulau. Kondisi ini menyebabkan tingginya arus perpindahan penduduk. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan orang terlantar guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini memiliki kebaruan yaitu penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penanganan orang terlantar yang masih belum banyak menjadi fokus penelitian dibandingkan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai analisis untuk menilai pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di dinas sosial kota Tanjungpinang dengan mempertimbangkan keberadaan Tim Reaksi Cepat yang dibentuk melalui keputusan wali kota nomor 107 tahun 2025 sebagai bentuk inovasi kelembagaan dalam percepatan penanganan sosial.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang menggunakan model George C. Edward III (1980). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan bidang Rehabilitasi Sosial terhadap orang terlantar yang ada di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan penanganan orang terlantar yang dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 pendekatan deskriptif analitis memungkinkan peneliti mengurai fenomena implementasi kebijakan termasuk faktor pendukung dan penghambat yang bersifat kontekstual dan tidak diukur hanya melalui kuantitatif.

Lokasi dan waktu penelitian adalah Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang khususnya bidang Rehabilitasi Sosial, lokasi penampungan sementara atau panti sosial di wilayah Kota Tanjungpinang serta lokasi interaksi antar petugas dan orang

terlantar pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni 2026 dengan fokus analisis Dan studi dokumen yang mencakup periode pelaksanaan program pada tahun anggaran 2025.

Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi kebijakan penanganan orang terlantar dan dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) analisis difokuskan pada 4 indikator utama yaitu Pertama, komunikasi, meliputi kejelasan transmisi kebijakan konsistensi pemerintah dan mekanisme koordinasi antar instansi. Kedua, sumber daya mencakup ketersediaan SDM anggaran APBD Kota Tanjungpinang tahun 2025 fasilitas dan kewenangan bidang rehabilitas sosial. Ketiga, disposisi yaitu sikap dan komitmen serta respon pelaksana kebijakan. Keempat, struktur birokrasi meliputi pembagian tugas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hierarki yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan informan proposif untuk memperoleh informasi konsep kontekstual dan naratif tentang pelaksanaan program observasi partisipatif atau non partisipatif untuk mengamati proses pelayanan kondisi fasilitas penampungan dan interaksi petugas dan klien di lapangan serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti tertulis mengenai lokasi anggaran target dan Realisasi program Rehabilitas Sosial pada tahun 2025.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sesuai model Miles Huberman dan Saldana tahun 2014. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2023) yang mencakup tiga tahap: Pertama, kondensasi data yakni proses pemilihan pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan transkrip wawancara dan dokumen. Kedua, penyajian data yaitu penyusunan data terpilih ke dalam bentuk narasi terstruktur matriks atau bagan alur untuk memudahkan identifikasi pola implementasi berdasarkan 4 indikator George C. Edward III (1980). Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu penarikan makna dari data yang disajikan disertai pengujian kebenaran dan selama proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan akhir terkait efektivitas implementasi kebijakan.

Untuk menjamin kredibilitas dan validitas data penelitian ini menerapkan teknik triangulasi meliputi Triangulasi sumber atau membandingkan pernyataan antara informan serta dokumen dokumen terkait serta triangulasi teknik atau membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan temuan dan mengurangi penyimpangan selama proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penanganan Orang Terlantar Tahun 2025

Penanganan orang terlantar adalah salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam pelayanan rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah keterlantaran agar dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar serta dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 terdapat 55 orang terlantar yang memperoleh pelayanan oleh bidang rehabilitasi sosial dengan penanganan yang diberikan antara lain pemulangan ke daerah asal, rekomendasi pelayanan kesehatan melalui Jamkesda, dan bentuk penanganan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh individu yang mengalami masalah keterlantaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah keterlantaran masih menjadi salah satu masalah sosial yang memerlukan perhatian pemerintahan daerah. Klien yang ditangani oleh bidang Rehabilitasi Sosial tidak hanya orang Tanjungpinang tetapi juga berasal dari daerah lain seperti Batam, Medan, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tanjungpinang sebagai Kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatnya kasus keterlantaran.

Tabel 1. Karakteristik Orang Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jumlah	Presentase
Laki-laki	38	69,1%
Perempuan	17	30,9%
Total	55	100%

Tabel 1 Menunjukkan bahwa dari 55 klien orang terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi klien dengan jenis kelamin laki-laki ada sebanyak 38 orang atau 69,1% dan berjenis kelamin perempuan ada 17 orang atau 30,9% dengan mayoritas penerima layanan yang berjenis kelamin laki-laki menunjukkan bahwa adanya tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kondisi keterlantaran. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh tingginya mobilitas kelompok usia produktif yang merantau untuk bekerja dan mencari kehidupan di Kota Tanjungpinang.

Dalam proses penanganan sebagian klien mengalami kesulitan dalam ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehabisan biaya perjalanan, serta putusnya hubungan dengan keluarga sehingga berada dalam kondisi terlantar. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik penerima manfaat menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan karena mempengaruhi jenis penanganan yang diberikan karena semakin beragam karakteristik sasaran kebijakan semakin besar kebutuhan koordinasi dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pelayanan.

Tabel 2. Bentuk Penanganan Orang Terlantar Tahun 2025

Jenis Penanganan	Jumlah	Persentase
Pemulangan ke daerah asal	26	47,3%
Rekomendasi Jamkesda	18	32,7%
Penanganan sosial lainnya	11	20,0%
Total	55	100%

Berdasarkan tabel 2 data penanganan orang terlantar tahun 2025 menunjukkan bahwa bentuk pelayanan yang paling banyak diberikan adalah pemulangan ke daerah asal sebanyak 26 orang atau 47,3% selanjutnya sebanyak 18 orang atau 32,7% memperoleh rekomendasi pelayanan kesehatan melalui Jamkesda dan 11 orang atau 20% memperoleh bentuk peranan sosial lainnya. Pemulangan ke daerah asal menunjukkan bahwa besar orang terlantar yang ditemukan di Kota Tanjungpinang banyak berasal dari luar daerah. Dalam kondisi tersebut strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah mengembalikan klien ke lingkungan keluarga atau daerah asal agar memperoleh dukungan sosial yang lebih memadai. sementara itu tingginya jumlah penerima manfaat yang memperoleh rekomendasi jamkesda menunjukkan bahwa masalah kesehatan menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang banyak ditemukan pada kelompok orang terlantar di Tanjungpinang.

Oleh karena itu koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan penanganan orang terlantar. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan terlantar masih didominasi oleh pendekatan rehabilitatif dan pemenuhan kebutuhan dasar program yang bersifat pemberdayaan sosial dan ekonomis yang panjang masih relatif terbatas sehingga pelayanan yang lebih banyak diarahkan pada penyelesaian masalah yang mendesak.

Implementasi Kebijakan Penanganan Orang Terlantar Berdasarkan Teori George C. Edwards III (1980)

1. Komunikasi (*communication*)

Menurut George C. Edwards III (1980), komunikasi adalah sebuah factor penting dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Penyampaian informasi, instruksi, dan koordinasi antar pelaksana kebijakan.

Komunikasi yang baik akan memudahkan dalam pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan orang terlantar di Kota Tanjungpinang telah berjalan cukup baik. Informasi mengenai adanya orang terlantar sering di terima dari laporan masyarakat kemudian di sampaikan kepada kepala bidang Rehabilitasi Sosial untuk di tindaklanjuti.

Selain itu, dalam koordinasi internal antara Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta berlangsung secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu informan menyatakan bahwa komunikasi dalam penanganan orang terlantar berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Selain komunikasi internal, koordinasi juga dilakukan dengan beberapa pihak terkait seperti dinas social provinsi, satpol PP, rumah sakit, serta pemerintahan didaerah luar yang berhubungan dengan pemulangan klien kedaerah asalnya. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor utama dalam penanganan orang terlantar di kota tanjungpinang.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya adalah salah satu faktor yang menentukan kemampuan instansi dalam melaksanakan suatu kenijakan. Menurut Edward III (1980), sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran, fasilitas serta kewenangan yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam dalam implementasi kebijakan penanganan orang terlantar dikota tanjungpinang seperti keterbatasan anggaran, dan keterbatasan pegawai pada bidang rehabilitasi social. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jumlah staff yang tersedia belum sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani.

Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan pegawai harus menangani berbagai kategori pemerlu pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) secara bersamaan. Selain itu, jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya juga tidak bisa di prediksi dan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam situasi ini, Bidang Rehabilitasi Sosial tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat namun apabila kondisi ini terus berlanjut dalam jangka yang panjang akan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab secara sungguh sungguh. Aspek disposisi mencakup komitmen, kesediaan, serta kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya yang memadai tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan dedikasi pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Berdasrakan hasil penelitian, disposisi pelaksana dalam penanganan orang terlantar di kategorikan baik terlihat sari adanya kerja sama yang terjalina antar pegawai serta komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu informan menyampaikan bahwa semua kasus keterlantaran baik yang melibatkan lanjut usia maupun anak terlantar merupakan tanggungjawab bidang rehabilitasi social. Selain itu Pelaksana menunjukkan sikap responsive terhadap laporan yang diterima darimasyrakata sesuai prosedur yang berlaku.

Tanggungjawab dan kepedulian yang di miliki oleh para pelaksana mendukung efektivitas penanganan orang terlantar sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal. Disposisi yang positif tercermin dari kesediaan pegawai untuk saling membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penerima layananserta berupaya memberikan pelayanan terbaik meskipun mengalami berbagai ketrbatasan. Sehingga pelaksanaan kebijakan penanganan orang terlantar bisa terlaksana ddengan baik dan tercapai secara maksimal.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mencakup pembagian tugas, wewenang, serta mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kejelasan struktur birokrasi sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam penanganan orang terlantar telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di dinas sosial kota tanjungpinang Kepala dinas memiliki peran dalam mengambil keputusan serta mengawasi pelaksanaan program sedangkan kepala bidang rehabilitasi sosial dibantu oleh pejabat fungsional dan pegawai untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan orang terlantar. Dalam pelaksanaan program telah mengacu pada standar operasional pelayanan (SOP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan alur kerja serta tanggungjawab masing-masing pelaksana juga berkontribusi dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Selain didukung oleh pembagian tugas yang jelas, struktur birokrasi yang baik mempermudah koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan penanganan orang terlantar. Koordinasi yang efektif mendukung setiap pelaksana memahami peran dan tanggungjawab sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara terintegrasi adanya struktur birokrasi yang terorganisir dan didukung oleh koordinasi yang baik di dinas sosial kota tanjungpinang pelaksanaan kebijakan penanganan orang terlantar berjalan dengan baik.

Analisis integratif

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang rehabilitasi sosial dinas sosial kota tanjungpinang tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh 4 unsur utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Empat faktor ini saling berkaitan dalam menentukan efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi menjadi salah satu aspek yang paling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penanganan orang terlantar memerlukan koordinasi antar instansi lain dan melibatkan berbagai pihak seperti pihak rumah sakit, Satpol PP, pemerintahan daerah asal klien berasal, serta masyarakat yang memberikan laporan. Kejelasan alur komunikasi memudahkan dalam menindaklanjuti kasus dengan cepat sehingga pelayanan yang diberikan lebih responsif.

Dari segi sumber daya, penelitian menemukan bahwa adanya keterbatasan pada jumlah pegawai dan keterbatasan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan pelayanan dengan petugas yang tersedia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kota tanjungpinang memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan dan pusat mobilitas penduduk sehingga sangat rentan terhadap kasus keterlambatan yang cukup tinggi. Di Dinas Sosial sendiri jumlah klien yang sudah ditangani tahun 2025 sebanyak 55 klien dengan kasus yang berbeda-beda. Adanya keterbatasan sumber daya menyebabkan pegawai harus menangani berbagai kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara bersamaan sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan dalam jangka panjang.

Faktor disposisi menunjukkan hasil yang cukup positif. Pelaksana atau petugas penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Sikap responsif yang diberikan terhadap setiap laporan yang diterima, kesediaan bekerja di luar jam kerja, serta menjalin kerjasama antar pegawai menjadi bukti tanggungjawab yang diberikan oleh petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana dalam menjalankan tugas sangat menentukan keberhasilannya

sikap pelaksana yang positif dapat menutupi berbagai keterbatasan yang ada karena tidak hanya menjalankan tugas karena tuntutan tetapi kepedulian terhadap kebijakan yang ingin dicapai.

Dalam struktur organisasi di dinas sosial kota tangjungpinang telah berjalan dengan cukup baik melalui pembagian tugas yang jelas dan penggunaan SOP sebagai pedoman dalam menjalankan pelayanan. Kejelasan struktur organisasi memungkinkan setiap pegawai memahami tugas dan tanggungjawab sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan. Struktur birokrasi yang sudah terorganisir juga membantu mendukung Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam proses koordinasi internal ketika terjadi kasus yang membutuhkan penanganan cepat.

Dari temuan ini, dengan data penanganan orang terlantar tahun 2025 dengan mayoritas pelayanan yang diberikan adalah pemulangan kedaerah asal (47,3%) dan rekomendasi jamkesda (32,7 %) kondisi ini menunjukkan implementasi kebijakan yang di laksanakan oleh bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang masih berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek. Meskipun langkah ini juga efektif untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat namun program ini mengakibatkan kasus keterlantaran masih terulang karena permasalahan sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan orang terlantar di kota tangjungpinang telah berjalan cukup efektif akan tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh dinas sosial kota tangjungpinang khususnya dibidang rehabilitasi sosial. Oleh karena itu peningkatan jumlah sumber daya manusia dan dukungan anggaran, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dalam menjalankan pelayanan dimasa yang akan mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 telah terlaksana dengan cukup baik berdasarkan 4 indikator yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari empat indikator sumber daya masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan baik itu jumlah pegawai dan alokasi anggaran serta fasilitas yang tidak memadai, akibatnya penanganan yang dilakukan masih cenderung berfokus pada kebutuhan mendesak seperti pemulangan kedaerah asal dan layanan kesehatan sehingga tidak mencapai program pelayanan jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian implementasi kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi bekerja dalam penanganan orang terlantar pada daerah yang memiliki karakteristik mobilitas penduduk tinggi. Temuan ini memperluas kajian implementasi kebijakan di bidang rehabilitasi sosial yang selama ini masih berfokus pada kelompok rentan tertentu seperti anak terlantar dan lanjut usia terlantar.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implemementasi kebijakan penanganan orang terlantar di dinas sosial kota tangjungpinang perlu melakukan penguatan sumber daya baik itu sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta fasilitas yang memadai agar program penangan orang terlantar yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial tidak hanya berorientasi pada penanganan yang bersifat sementara tetapi juga diarahkan pada program yang berkelanjutan. Serta terus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai instansi setempat yang berhubungan dengan penanganan orang telantar guna menciptakan penanganan yang lebih terpadu. Dengan demikian, upaya penanganan orang terlantar dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan mencegah kasus keterlantaran secara terus-menerus.

REFERENSI

- Afandi, M. N., Suciarti, S. N., & Kristian, I. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Terlantar di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Astuti, M., Sauqi, S., & Ariani, D. (2015). Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar. *Sosio Konsepsia*.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Siswanto, S., Yuliani, F., & Meilani, N. L. (2024). Implementasi Program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Usia Lanjut Terlantar. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Wiryan, A. P. (2024). Analisis Efektivitas Penanganan PMKS melalui Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sihombing, J., Samudera, M. T., Ridhanto, R. K. T., & Hertati, D. (2025). Analisis Tantangan Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Program PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Di UPTD Liponsos Keputih. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 8218-8229.
- Nomor, P. M. S. R. I. (7). *Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*.
- Wiryan, A. P. (2024). Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 233-247.
- Lestari, G. A. (2021). *Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang kesejahteraan sosial terhadap perlindungan hukum bagi lanjut usia terlantar dalam pelayanan publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Dini, I. R. (2024). *Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Hy, M., & Laksana, B. I. (2024). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU. *Dakwatul Islam*, 9(1), 133-154.